

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh terhadap sendi – seni kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen yang ada dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal.

Ditingkat lokal terjadi perubahan pembangunan pemerintahan yang membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perubahan mendasar dalam Politik kita tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, perubahan tersebut dimaksudkan agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah daerah menuangkan program tersebut dalam sebuah rancangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJN 2005 – 2025 Pasal 6 ayat (2) dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi nasional yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, Meningkatkan kualitas SDM.

Membangun kemampuan IPTEK dan memperkuat daya saing Perekonomian dan memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Riau dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nomor 9 Tahun 2009, yaitu : *“Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis , Sejahtera Lahir Dan Batin Di Asia Tenggara Tahun 2020”*, Serta berpegang pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti PLT H. Asmar , yaitu *“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani”*.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti setiap satuan kerja memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang bersih (*clean*

governance), serta pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan sistem proses yang demokrasi , transparasi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Rencana Kerja SKPD Selama 1 Tahun Berjalan.

Salah satu sarana yang dapat di gunakan untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja pembangunan di Kabupaten/Kota adalah Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota. Dengan demikian dapat di katakan bahwa Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota ini pada intinya berisi berbagai data/informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten/Kota.

Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dicermati dan sedapat mungkin menggunakan petunjuk teknis sebagai acuan sehingga dapat di kompilasi menjadi Profil Kabupaten dan kompilasi menjadi Profil Propinsi dan selanjutnya menjadi Profil Indonesia serta dapat dikomparasikan antar satu daerah dengan daerah lain. Buku Profil ini disusun dengan format baru. Secara umum format petunjuk teknis ini menyajikan data-data pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada Tugas yang diberikan oleh pihak Bidang Bina Marga Merupakan peningkatan jalan Tanjung Samak – Repan. Dengan panjang sekitar 5.800 meter sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pihak Bidang Bina Marga jalan tersebut merupakan jalan yang menghubungkan desa Tanjung Samak – Desa Penyagun.

1.2 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti dimaksudkan untuk menyajikan informasi pedoman dan acuan dalam pencapaian Visi Dan Misi yang telah ditetapkan dalam pencapaian kualitas organisasi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang bertujuan untuk menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memperhitungkan berbagai faktor eksternal yang menjadi peluang dan tantangan serta faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan.

Buku Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 ini merupakan potret pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Data yang dipergunakan dalam

penyusunan Buku Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti ini bersumber dari pencatatan dan pelaporan dari program dan jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, juga bersumber dari faktor lainnya di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Tujuan

Sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Yaitu : “ *Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan Unggul Dalam Tataan Masyarakat Madani*”.

Oleh karena itu, dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau *stakeholders* dalam wujud laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selaku dinas/instansi teknis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada TA 2024 ini merealisasikan peningkatan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang menggunakan sumber dana anggaran DAK TA 2024, Khususnya kegiatan peningkatan jalan Tanjung Samak – Repan sarana Desa Tanjung Samak – Desa Penyagun ini merupakan ruas jalan lokal berada di wilayah kecamatan rangsang ditinjau dari status kondisi geometrik jalan (*existing*) pada ruas jalan ini akan tetap ditingkatkan untuk memperlancar ruas jalan Tanjung Samak – Repan .

Pada lokasi yang akan dikerjakan oleh PT. ONGGARAADI PRATAMA ini mempunyai kondisi geometrik jalan (*existing*) yang rusak dan perlu dilakukan *overlay* ditingkatkan menjadi perkerasan lentur dimana pada beberapa kondisi geometrik jalan (*existing*) yang akan ditingkatkan dan memerlukan pelebaran badan jalan dengan lapis pondasi agregat kelas B dan kelas A dan bahu jalan dengan kelas S serta penimbunan badan jalan, Timbunan biasa dan urugan pilihan, dan juga diperlukan perkerasan aspal.

Adapun target manfaat dari kegiatan peningkatan jalan Tanjung Samak – Repan sarana Desa Tanjung Samak – Desa Penyagun ini secara makro adalah:

- a. Untuk mempermudah akses jalan Tanjung Samak – Repan bagi masyarakat
- b. Meningkatkan pelayanan distribusi barang atau jasa.

1.2 Struktur Organisasi

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk Menyusun dan menetapkan organisasi perangkatnya daerahnya sesuai kebutuhannya, dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Kepala Dinas: Pimpinan utama dari Dinas PUPR yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh dinas tersebut.
2. Sekretariat Dinas: Bagian yang menangani administrasi umum, termasuk surat-menyurat, keuangan, dan koordinasi internal.
3. Bidang-Bidang Teknis: Biasanya terdiri dari beberapa bidang yang masing-masing menangani aspek teknis tertentu, seperti:
 - a. Bidang Cipta Karya: Mengelola perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti gedung, fasilitas umum, dan perumahan.
 - b. Bidang Bina Marga: Berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya.
 - c. Bidang Sumber Daya Air: Mengelola pengelolaan sumber daya air, termasuk irigasi, pengendalian banjir, dan pengelolaan sungai.
4. Sub-Bagian atau Seksi: Setiap bidang mungkin dibagi menjadi beberapa sub-bagian atau seksi yang menangani tugas-tugas lebih spesifik.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT): Beberapa dinas memiliki UPT yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek-proyek tertentu di lapangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional: Terdiri dari para ahli atau pegawai dengan jabatan fungsional yang mendukung kegiatan teknis dan administratif.

Berikut adalah struktur organisasi umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Meranti beserta fungsi-fungsi masing-masing.

1. Kepala Dinas PUPR

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR, perencanaan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan. Memimpin serta membuat kebijakan strategis terkait pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

2. Sekretariat Dinas

Mengelola administrasi umum dinas, termasuk surat-menyurat, keuangan, dan koordinasi internal. Menyediakan dukungan administratif untuk kegiatan dinas serta mengelola arsip dan dokumentasi.

3. Bidang Cipta Karya

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek terkait bangunan dan infrastruktur seperti gedung pemerintah, fasilitas umum, dan perumahan. Mengelola perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur non-jalan.

4. Bidang Bina Marga

Mengelola pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta infrastruktur transportasi lainnya. Bertugas dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan dan jembatan.

5. Bidang Sumber Daya Air

Mengelola pengelolaan sumber daya air, termasuk sistem irigasi, pengendalian banjir, dan pengelolaan sungai. Bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan terkait pengelolaan sumber daya air.

6. Sub-Bagian atau Seksi

Masing-masing bidang sering dibagi menjadi beberapa sub-bagian atau seksi yang menangani tugas-tugas spesifik. Misalnya, seksi perencanaan, seksi pengawasan, dan seksi pelaksanaan proyek.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bertugas melaksanakan kegiatan teknis di lapangan, seperti proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. UPT dapat berupa unit pelaksana yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek tertentu.

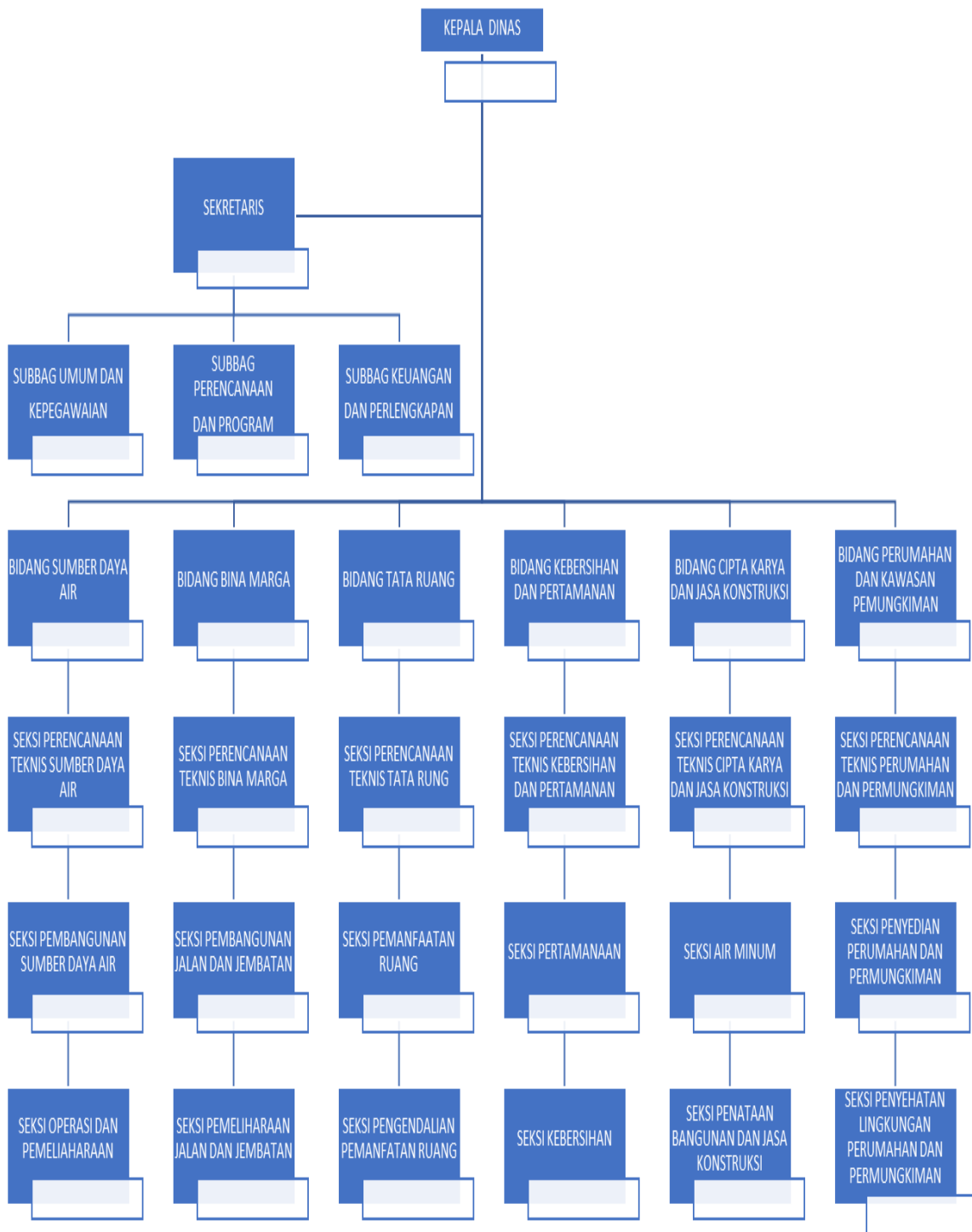
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari para ahli atau pegawai yang memiliki jabatan fungsional spesifik, seperti perencana, pengawas, dan pelaksana teknik. Mereka memberikan dukungan teknis dan keahlian dalam berbagai aspek.

9. Bagian Pengawasan

Mengawasi pelaksanaan proyek dan kegiatan, memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUNGKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



1.3 Ruang Lingkup

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti banyak dinas pemerintah daerah lainnya di Indonesia, dibentuk untuk mengelola dan menyelenggarakan berbagai aspek pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah berdirinya Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti:

1. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 2010. Sebelum menjadi kabupaten sendiri, wilayah Kepulauan Meranti merupakan bagian dari Kabupaten Riau. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk mempermudah administrasi dan pengelolaan wilayah yang terdiri dari sejumlah pulau di Provinsi Riau.

2. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Setelah pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, berbagai dinas dan instansi pemerintah dibentuk untuk mendukung administrasi dan pembangunan di kabupaten tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah salah satu dinas penting yang dibentuk untuk mengelola pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

Dinas PUPR bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, serta pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang. Dinas ini juga berperan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dan mengatur pemanfaatan lahan.

3. Penyesuaian dan Pengembangan

Seiring waktu, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami perubahan dan penyesuaian struktur organisasi untuk lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perubahan ini termasuk penambahan atau pengurangan bidang dan seksi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Dinas PUPR terus beradaptasi dengan regulasi dan kebijakan terbaru baik dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk mengikuti peraturan-peraturan terbaru terkait perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya air.

4. Kontribusi Terhadap Pembangunan Daerah

Dinas PUPR telah melaksanakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur penting di Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penataan Ruang: Dinas PUPR juga berperan dalam penataan ruang wilayah untuk memastikan penggunaan lahan yang optimal dan terencana, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan.

5. Pengembangan Kapasitas dan Peran

1. Dinas PUPR berupaya meningkatkan kapasitas pegawai dan kualitas kerja melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Ini untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memenuhi standar kualitas dan efisiensi yang ditetapkan.
2. Dinas ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unit yang bertanggung jawab atas administrasi umum dan koordinasi internal dinas. Berikut adalah beberapa fungsi dan tanggung jawab utama dari Sekretariat PUPR:

Fungsi dan Tanggung Jawab Sekretariat PUPR Meranti

1. Administrasi Umum

Pengelolaan Surat-Menyurat: Mengelola semua aspek surat-menyurat dinas, termasuk penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan dokumen penting.

Dokumentasi: Menyusun dan mengelola arsip dan dokumentasi terkait kegiatan dinas, termasuk laporan kegiatan, keputusan, dan surat-surat resmi.

2. Pengelolaan Keuangan

Administrasi Keuangan: Mengelola administrasi keuangan dinas, termasuk anggaran, pengeluaran, dan laporan keuangan.

Penyusunan Anggaran: Membantu dalam penyusunan dan pengawasan anggaran dinas, memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran.

3. Koordinasi Internal

Koordinasi dan Komunikasi: Mengatur koordinasi antara berbagai bidang atau seksi di dalam dinas, serta memfasilitasi komunikasi internal.

Pengaturan Jadwal: Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan dinas, termasuk rapat, seminar, dan acara resmi.

4. Pengembangan dan Manajemen SDM

Administrasi Pegawai: Mengelola administrasi pegawai dinas, termasuk kehadiran, cuti, dan pengembangan karir.

Pelatihan dan Pengembangan: Mengorganisasi pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai dinas.

5. Layanan Umum

Layanan Informasi: Menyediakan layanan informasi kepada publik mengenai kegiatan dan kebijakan dinas.

Pengaduan dan Masukan: Menangani pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan dinas.

6. Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan

Perencanaan Kegiatan: Membantu dalam perencanaan kegiatan dinas dan memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan Implementasi: Mengawasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sekretariat PUPR umumnya terdiri dari beberapa sub-bagian atau unit yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik, seperti:

- a. Sub-Bagian Administrasi Umum: Bertanggung jawab atas administrasi umum dan pengelolaan dokumentasi.
- b. Sub-Bagian Keuangan: Mengelola administrasi keuangan dan anggaran.
- c. Sub-Bagian SDM: Mengatur administrasi pegawai dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Sub-Bagian Pengembangan dan Perencanaan: Membantu dalam perencanaan kegiatan dinas dan pengawasan implementasi.